

MENGANDAIKAN BUDAYA TEKNOLOGI RAMAH PEREMPUAN

*Izzuki Muhiassonah**

Abstract

There are too many women and small groups that are left untouched by the government; it takes skill in science, especially in operating the machinery of communal economy. That is hoped for because women are not going to just stay at home and only worry about their family and always being subordinated by high technology culture. This phenomenon can still be tolerated; sadly word is still out in the newspapers, magazines, survey books and many researches that say that women still receive violence that are very diversified in motives and backgrounds. Violence to women is not only physical but also psychological, sexual, economical and the stealing of rights. That proves the existence of technological cultures that are women-unfriendly. Because of that, this article will try to discuss technological cultures that are not quite friendly or even hostile to women. Other than the discussion that focuses on that point, the main element that is targeted in this article is to think of how the current technology is upgraded to be women-friendly.

Kata Kunci : Teknologi, Budaya, Ramah Perempuan.

I. Pendahuluan

Informasi IPTEK yang bersumber dari suatu masyarakat lain tak dapat lepas dari landasan budaya masyarakat yang membentuk informasi tersebut. Karenanya di setiap informasi IPTEK selalu terkandung isyarat-

* Alumni FK Unair Surabaya, bertugas di R.S. Waluyo Jati Probolinggo Jatim.

isyarat budaya masyarakat asalnya.¹ Karena itu, perbedaan-perbedaan isyarat atau tata-nilai budaya dari masyarakat pengguna masyarakat asal teknologinya, dapat diartikan lain oleh masyarakat penerimanya. Akibat dari itu, cara pengoperasian teknologi di masyarakat yang bukan merupakan masyarakat pencipta teknologinya, tidak sepenuhnya bersesuaian dengan cara pengoperasiannya di lingkungan masyarakat asal teknologi tersebut. Bahkan pada titik terterkecil teknologi kadang dibuat sengaja untuk menelanjangi budaya-budaya yang seharusnya harus dijaga. Misalkan saja bagaimana seharusnya teknologi bisa ramah “lingkungan” khususnya bagi lingkungan kaum perempuan.

Sangat banyak wanita dan beberapa kelompok kecil yang jarang disentuh pemerintah, membutuhkan kecakapan di bidang ilmu pengetahuan khususnya dalam mengoperasikan mesin dan mengembangkan ekonomi masyarakat. Hal itu diharapkan karena wanita tidak terus menerus harus tinggal di rumah dan hanya mengurus keluarga yang seakan terus disubordinat dan dikebiri oleh budaya *high teknologi*. Fenomena tersebut jika dipikir masih agak bisa ditolelir dari pada belakangan ini terdengar banyak berita baik koran, majalah, survey books, dan beberapa penelitian yang mengatakan bahwa perempuan dalam bidang intelektual keakademikan masih diperlakukan tidak setara atau dengan kata lain ada upaya-upaya yang tidak senang jika perempuan menjadi ilmuwan.

Itu banyak terbukti dengan adanya budaya-budaya teknologi yang sedikit kurang ramah terhadap lingkungan perempuan. Karena itu, tulisan ini berupaya untuk mendiskusikan budaya-budaya teknologi yang kurang bahkan tidak ramah sekali dengan lingkungan perempuan. Selain pembahasannya mengfokus hal itu, point utama yang ingin dibidik dalam tulisan ini adalah mengandaikan atau bagaimana seandainya teknologi yang ada dewasa ini di *up-grade* ulang agar kiranya bisa ramah perempuan, ini penting.

¹ Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, terj. Hartian Silawati (Yogyakarta: Rifka Anisa' dan Pustaka Pelajar, 2007), 20-155. Lihat. Nussyahbani Katjasungkana (dkk), *Potret Perempuan; Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru* (Yogyakarta: PSW UMY dan Pustaka Pelajar, 2001), 23-107.

II. Budaya, Teknologi & Kekerasan Perempuan

Teknologi baru yang digunakan dalam bidang informasi dan komunikasi, terutama Internet telah membawa dunia masuk ke era baru. Ada pandangan utama yang mengatakan bahwa teknologi seperti itu tidak memiliki keterlibatan secara sosial, hanya secara teknis saja. Perubahan positif yang disebabkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ini, yang notabene berdampak secara dramatis, tidak menyentuh umat manusia keseluruhan. Bahkan cenderung mensubordinat wanita. Hubungan-hubungan kekuasaan yang telah ada dalam masyarakat menentukan tingkat penggunaan dan pengambilan keuntungan dari (TIK), karenanya teknologi ini tidak bersifat netral secara gender.²

Akses untuk TIK yang baru masih merupakan kenyataan yang jauh bagi sebagian besar orang. Negara-negara bagian selatan, khususnya di daerah pedesaan, secara nyata tertinggal jauh dari revolusi informasi, ditandai dengan tidak adanya infrastruktur dasar, biaya yang tinggi untuk pengadaan TIK, ketidaktahuan mengenai TIK, dominasi dari bahasa Inggris dalam isi Internet—kurangnya demonstrasi keuntungan TIK untuk menjawab tantangan pembangunan level bawah. Penghalang-penghalang ini bahkan menjadi masalah yang lebih besar bagi kaum wanita, yang secara umum buta huruf, tidak mengerti bahasa Inggris dan kurangnya kesempatan untuk mendapat pelatihan keterampilan komputer.

Tanggung jawab domestik, pembatasan budaya untuk perpindahan, kurang kuatnya kekuatan ekonomi sejalan dengan kurangnya relevansi kepuasan dalam hidup mereka, lebih jauh membuat mereka termarginalisasi dari sektor informasi. Bidang TIK ditandai dengan kontrol strategis yang dilakukan oleh perusahaan kuat dan oleh negara-negara kuat. Monopoli yang dibangun berdasarkan rejim kepemilikan intelektual, bertambahnya pengawasan Internet dan pengurangan keberadaan isi demokratisnya dan eksploitasi kaum lemah yang dilakukan imperialisme kapitalis, rasisme dan perbedaan gender (sexism). Dalam bidang TIK, wanita relatif memiliki ke-

² Chairil Anwar, *Islam dan Tantangan Kemanusiaan Abad XXI* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 9-43.

pemilikan dan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan, karena tidak terwakilkan dalam sektor privat dan pemerintahan yang mengontrol bidang ini.

TIK telah membawa keuntungan kepegawaian termasuk bagi wanita. Akan tetapi pemisahan gender yang direproduksi dalam ekonomi informasi di mana pria memegang mayoritas kaum yang memiliki keterampilan tinggi, menguasai pekerjaan yang bernilai tambah, di mana wanita terkonsentrasi pada pekerjaan keterampilan rendah dan bernilai rendah. Pekerjaan di call centre mengabadikan pekerjaan wanita dan organisasi dalam sektor teknologi informasi, seperti sektor lainnya, menghargai perilaku yang dikatakan maskulin.

Beberapa organisasi dan kelompok masyarakat mengikutsertakan isu yang berkaitan dengan demokrasi di bidang TIK—dari pembagian digital sekaligus hak untuk berkomunikasi, sampai keragaman budaya dan hak kepemilikan intelektual. Pendukung persamaan gender telah didesak untuk memperhatikan dimensi gender masyarakat informasi, yaitu dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan dan strategi nasional TIK, menyediakan isi yang relevan bagi wanita, mempromosikan partisipasi ekonomi kaum wanita dalam ekonomi informasi, sekaligus membuat aturan untuk melawan pornografi wanita dan anak-anak yang ada di Internet. The World Summit in the Information Society/Pertemuan Puncak Masyarakat Informasi Dunia (WSIS) yang dilakukan di Genewa pada bulan Desember 2003, membawa berbagai pelaku dalam bidang TIK untuk memperhatikan tantangan dan kemungkinan TIK, meskipun dengan berbagai hasil dan pandangan.

TIK juga telah digunakan oleh kebanyakan sebagai alat untuk transformasi sosial dan persamaan gender. Sebagai contoh, E-Commerce (perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan bantuan Internet) merupakan langkah awal yang dicoba di berbagai tempat oleh NGO (Non Government Organization/Organisasi Non Pemerintah) untuk menghubungkan para wanita ahli secara langsung ke pasar global melalui Internet, dan juga mendukung aktivitas mereka dengan informasi produksi dan pasar.

Program e-governance/pemerintahan melalui media elektronik telah dicoba oleh beberapa pemerintah menggunakan TIK untuk membuat pelayanan pemerintahan dapat lebih luas dijangkau oleh warga masyarakat. Dalam beberapa kasus disertai dengan strategi eksplisit untuk memastikan bahwa pelayanan ini menjangkau kaum wanita dan lainnya yang menghadapi halangan untuk mengakses layanan pemerintahan. Para pendidik kesehatan telah menggunakan sarana radio untuk mengkomunikasikan informasi yang berhubungan dengan kesehatan seks dan reproduksi. Kemungkinan komunikasi melalui sarana Internet juga sedang digali.

Berbagi informasi dan dialog melalui sarana email, newsletter dan catatan online antara wanita dari belahan Utara dan Selatan dan di antara para wanita di bagian Selatan itu sendiri telah memungkinkan kolaborasi dan pemfokusan usaha dalam skala global untuk mendorong agenda dari persamaan gender. Aktivitas-aktivitas tersebut telah sangat efektif di mana hal itu dapat dilakukan di atas isu keterbatasan akses dan infrastruktur untuk memandang konteks sosial yang lebih besar dan hubungan kekuasaan yang lebih besar. Tingkat efektivitas dan keterjangkauan telah diperkaya dengan kombinasi teknologi lama seperti radio dengan teknologi baru seperti Internet.

Perubahan yang lebih jauh bagi persamaan gender dan pemberdayaan wanita di bidang TIK sangat perlu menjangkau di semua level—internasional, nasional dan program. Persamaan gender di bidang TIK tidak selalu berarti penggunaan TIK yang lebih luas di kalangan wanita. Persamaan itu lebih ke arah transformasi sistem TIK. Hal ini melibatkan pemerintahan yang membangun kebijakan TIK dengan perspektif gender yang kuat dan berkaitan dengan masyarakat sipil, gender dan ahli TIK. Forum internasional seperti WSIS digunakan untuk menantang dominasi utara dan dominasi perusahaan di bidang TIK. Strategi gender, dibangun melalui desain, implementasi dan evaluasi dari proyek dan program TIK.

Pengumpulan informasi dengan statistik sex-disagregasi dan indikator gender berkaitan dengan akses, isi dan penggunaan TIK dalam hal kepegawaian dan pendidikan. Pertimbangan isu gender dalam kebijakan TIK/telekomunikasi, perwakilan dalam pengambilan keputusan berkaitan

dengan telekomunikasi/TIK dan tingkat perbedaan dampak dari telekomunikasi/TIK antara pria dan wanita. Untuk membuat semua ini terjadi, pendukung persamaan gender perlu terus menerus bekerja di bidang TIK dengan tiada lelah.

Mengamati peran dan sepaik terjang teknologi dewasa ini, meskipun banyak memberi manfaat, dampak yang ada pun tak bisa dihindari seperti beberapa kekerasan yang menimpa kepada wanita-wanita atau bahkan yang masih gadis kecil, disadari merupakan sumber dari sepaik terjangnya teknologi. Sebagaimana dikatakan berita Suara Pembaruan terbitan 12/3/2004, tindak kekerasan terhadap wanita belakangan ini terasa kian mencemaskan.³ Dari segi kuantitas, angkanya terus meningkat. Sepanjang tahun 2003 lalu, Lembaga

Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) menerima pengaduan sebanyak 627 orang. Rinciannya: 279 orang datang langsung, 159 orang konsultasi melalui telepon, 4 orang konsultasi melalui surat, 33 konsultasi melalui e-mail, 8 orang kasus jempu bola dan 144 orang konsultasi melalui radio. (Suara Pembaruan, 12/3/2004).

Hal itu merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya yang tercatat sekitar 528 pengaduan. Secara kualitas, tampak modus operandi tindak kekerasan terhadap wanita semakin bervariasi. Jika tahun-tahun sebelumnya kekerasan terhadap wanita lebih banyak ke arah fisik, kini juga ke arah psikis dan ekonomis. Dari angka di atas, tercatat 280 orang mengadukan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya dengan modus antara lain 70 kasus korban kekerasan fisik, 124 kasus korban kekerasan psikis, 85 kasus korban kekerasan ekonomi dan satu kasus korban kekerasan seksual.⁴

Sementara itu, tercatat 14 kasus nikah di bawah tangan, 23 kasus ingkar janji, 32 kasus menikah tanpa izin dan 5 kasus warisan. Sisanya, 11

³ Arvita Yulia, "Kekerasan terhadap Wanita Kian Mencemaskan", dalam *Suara Pembaruan Daily*, Selasa/10 Juli 2007.

⁴ Arvita Yulia, "Kekerasan terhadap Wanita Kian Mencemaskan", dalam *Suara Pembaruan Daily*, Selasa/10 Juli 2007.

kasus adopsi, 3 kasus penahanan bayi, 1 kasus malpraktek, 52 kasus pidana umum dan 27 kasus perdata umum. Perkosaan meningkat selama tahun 2003 lalu. Kasus perkosaan terhadap wanita khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya meningkat tajam. Dari jumlah kejahatan keseluruhan yang tercatat 35.657 kasus (atau meningkat 4 persen dari tahun 2002 yang tercatat 34.270 perkara), kasus perkosaan tercatat 134 perkara atau meningkat 25,3 persen dari tahun 2002 yang tercatat hanya 107 kasus. Peningkatan 25,3 persen merupakan angka di atas angka toleransi kenaikan kejahatan yang 10 persen. Tentu saja, jumlah kasus tersebut belum menunjukkan angka yang sebenarnya karena angka gelap (dark number) yang tidak terungkap ke permukaan cukup banyak.

Ada beberapa faktor utama yang dapat diidentifikasi dari kasus-kasus yang terjadi terkait kekerasan terhadap perempuan.⁵ *Pertama*, ringannya hukuman yang diterima pelaku. Meningkatnya kejahatan seksual sekarang tidak dapat dilepaskan dari masalah hukum. Selama ini, meskipun sudah cukup banyak pihak meneriakkan agar pelaku kejahatan seksual dijatuhi hukuman berat karena pelaku telah merusak masa depan korban, namun di pengadilan tetap saja pelaku di hukum ringan. Kita tidak pernah mendengar, sekeji apapun perbuatan pelaku kejahatan seksual atau perkosaan, di hukum maksimal yakni seumur hidup apalagi dihukum mati. Dari sisi hukum, kejahatan-kejahatan seksual diatur dalam Bab XIV KUHP tentang kejahatan kesusilaan. Di sana dinyatakan, hukuman bagi kejahatan kesusilaan (seksual) dapat dijatuhi hukuman paling tinggi 12 tahun penjara. Hukuman yang sangat ringan dan bisa menjadi senjata ampuh bagi pelaku kejahatan untuk tidak terkena hukuman maksimal.

Kedua, peran korban. Dari berbagai studi ahli kejahatan (kriminolog) memperlihatkan, terjadinya kejahatan juga disebabkan oleh hubungan atau interaksi sosial antara korban dan pelaku. Kriminolog Wolfgang misalnya memperlihatkan hasil studi bahwa meningkatnya kejahatan disebabkan oleh andil korban sendiri. Dalam hal ini, korban memberikan peluang, dengan demikian ada kesempatan pelaku untuk melakukan kejahatan seksual. Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia (LK-UI)

⁵ *Ibid.*

pernah melakukan penelitian yang hasilnya sebagai berikut: dari 100 kasus perkosaan memperlihatkan bahwa mayoritas (74 persen) pelakunya adalah “orang dekat” (majikan buruh, hubungan keluarga, ayah kandung dan “orang dekat” lainnya).

Ketiga, faktor budaya atau kultur masyarakat. Meningkatnya kasus kejahatan seksual juga tak dapat dilepaskan dari budaya masyarakat yang menganggap kasus kejahatan seksual harus ditutupi. Masyarakat menganggap kasus kejahatan seksual merupakan masalah masyarakat, bukan masalah orang per orang. Bahkan, masyarakat kerap kali tidak mendukung korban kejahatan seksual untuk melaporkan kasusnya ke kepolisian karena dianggap akan mencemarkan nama baik masyarakat setempat. Yang menyesakkan dada, masyarakat justru menyalahkan korban perkosaan dan menganggapnya sebagai “manusia kotor”, membawa aib dan sebagainya. Korban kejahatan seksual akhirnya ibarat “sudah jatuh tertimpa tangga”. Masa depannya hancur oleh peristiwa kejahatan seksual dan semakin hancur karena persepsi masyarakat yang buruk terhadapnya yakni sebagai “manusia ternoda”.

Keempat, keengganan atau ketakutan korban untuk melaporkan kasusnya kepada polisi. Hal ini berkenaan dengan soal aib dirinya yang tidak ingin diketahui masyarakat. Ketakutan korban melaporkan kasusnya kepada polisi juga disebabkan karena polisi selama ini kurang menanggapi secara serius kasus kejahatan seksual yang menyimpannya. *Kelima*, maraknya peredaran VCD (*Video Compact Disc*). Pengaruh VCD porno yang beredar di jalanan adalah faktor lainnya yang menyebabkan meningkatnya kejahatan seksual. Film-film VCD porno yang memamerkan adegan vulgar dan perilaku asosial lainnya telah mempengaruhi dan menjadi prakondisi khususnya bagi anak-anak dan remaja untuk melakukan hal-hal tak senonoh.

Meningkatnya kasus kejahatan seksual, diakui atau tidak, adalah karena kesalahan di berbagai pihak. Karena itu, agar kasusnya ke depan tidak semakin meningkat, maka tanggung jawab bersama merupakan awal untuk mencegahnya.⁶ Di antara tanggung jawab itu adalah; *Pertama*, dari

⁶ *Ibid.*

sisi hukum dan peradilan. Dalam hal ini harus ada semacam kebijakan kriminal (*criminal policy*) dari para ptinggi hukum negeri ini. Intinya, para pelaku kejahatan seksual harus mendapat hukuman seberat-beratnya. Jika perlu diberlakukan hukuman seumur hidup bahkan hukuman mati. *Criminal policy* lainnya yang terpenting adalah adanya semacam victim center untuk membantu konsultasi dan rehabilitasi mental dan fisik korban.

Kedua,⁷ korban perkosaan harus berani melaporkan kasusnya kepada berbagai pihak yang konsen dengan kasus kejahatan seksual dan khususnya melaporkan kepada ke polisi. Polisi juga harus selalu menanggapi setiap laporan kasus kejahatan seksual secara serius, bukannya memojokkan korban seperti selama ini terjadi. *Ketiga*, masyarakat harus mendukung korban untuk melaporkan kasusnya, dan mengubah persepsi dari menganggap “kotor” korban menjadi memberikan bantuan seperti pelayanan kesehatan, dan perlindungan hukum. *Keempat*, memberantas peredaran VCD porno. Dalam hal ini, diperlukan peran keluarga, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kalangan bisnis dan pedagang VCD, dan yang terpenting adalah peran pemerintah.

III. Teknologi Ramah Perempuan

Menurut info yang diberitakan kominfo.go.id., kejahatan teknologi informasi (*cyber crime*) melalui internet tumbuh subur di Indonesia. Di sejumlah kota besar seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta, pelaku aksi *cyber crime* sebagian besar oknum terdidik seperti mahasiswa. Kejahatan macam ini terus berlangsung dalam tiga tahun belakangan ini. Menurut Budi Rahardjo, Direktur Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri dan Teknologi Informasi Institut Teknologi Bandung, sebagaimana diberitakan kominfo.go.id., mengatakan bahwa persoalan tersebut sangat ironis ketika hukuman terhadap pelakunya cukup ringan, bahkan banyak pihak berpendapat pelakunya adalah “pahlawan”. Padahal, dibalik kejahat-

⁷ *Ibid.*

an itu para pelaku telah mencoreng nama bangsa, merugikan pihak-pihak pelaku bisnis melalui teknologi informasi atau dikenal praktek e-business.

Lebih lanjut, Budi Rahardjo mengatakan, berkembangnya cyber crime di kota-kota besar ditunjang karena ketiadaan perangkat hukum yang mengatur hukum dan sanksi di bidang cyber. Ia mengungkapkan, biasanya kejahatan di bidang ini dihukum ringan maksimal setahun, seperti yang terjadi pada pelaku carding di Jakarta. Menurut Budi, selain kejahatan di bidang teknologi informasi sangat memalukan bangsa Indonesia, juga menghambat kepentingan masyarakat Indonesia untuk kemajuan pendidikan, teknologi, dan berbisnis secara teknologi informasi serta berbudaya teknologi yang baik. Menurutnya, posisi Indonesia dalam kejahatan teknologi informasi adalah nomor dua setelah Ukraina, sementara penetrasi Internet masyarakat Indonesia tergolong sedikit di dunia internasional, tak sampai 5 juta.

Karena itu, Temu Nasional Aktivis Perempuan Indonesia, sebagaimana dilansir rumahkiri.net, telah menghasilkan 12 agenda khusus gerakan perempuan untuk tahun 2006-2011.⁸ Khusus di bidang teknologi, aktivis perempuan mengagendakan program sebagai berikut; 1). Meningkatkan kapasitas perempuan dalam pemanfaatan berbagai teknologi, 2). Menggunakan teknologi untuk membangun simpul informasi dan komunikasi, 3). Memperkuat akses perempuan terhadap teknologi, 4). Melakukan kampanye teknologi yang ramah perempuan.

Adapun isu perempuan dan sumber daya perempuan, digiring untuk mengaplikasikan program seperti; 1). Mengintegrasikan isu sumber daya perempuan dalam gerakan sosial lain, 2). Mengkampanyekan hak asasi perempuan dalam pengelolaan sumber daya perempuan, 3). Pengelolaan sumber daya perempuan berbasis komunitas yang responsif gender (misalnya petani, nelayan dll), 4). Menuntut tanggungjawab negara dan korporasi yang merusak lingkungan hidup dan melanggar hak asasi perempuan dan adat, 4). Menolak pembayaran utang luar negeri yang bersumber dari eksploitasi sumber daya perempuan, 5). Advokasi kebijakan dan kasus pengelolaan sumber daya perempuan.

⁸ Sumber diambil dari *Rumahkiri.net*.

Sedangkan isu perempuan dan globalisasi yang disuarakan adalah seperti; 1). Mensosialisasikan isu globalisasi ekonomi dan moneter serta dampaknya ke semua pihak sehingga menjadi isu bersama, 2). Menolak 3 pilar (deregulasi, privatisasi dan liberalisasi) globalisasi yang tidak berpihak kepada rakyat terutama perempuan, 3). Seluruh aset industri, termasuk TNC & MNC harus dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat lokal, 4). Membangun jaringan perempuan melawan arus neolib, 5). Kaderisasi dan transfer pengetahuan globalisasi ke kader aktifis.⁹

Sesuai perkembangan pemikiran dan penelitian, kekerasan terhadap perempuan ternyata begitu beragam motif dan latar belakangnya. Kekerasan terhadap kaum hawa, tidak semata berbentuk fisik, akan tetapi juga psikologis, seks, ekonomi, dan perampasan hak. Ironisnya, perangkat hukum yang ada pun belum cukup melindungi perempuan dari tindakan kekerasan. Sementara itu, kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk *trafficking*, diungkapkan Siti Homzah dalam sebuah seminar yang bertopik “Kekerasan terhadap Perempuan, Alternatif dan Solusi” yang diselenggarakan Ikatan Sosiolog Indonesia (ISI) Jabar bekerja sama dengan Kantor BKKBN Jabar, mengatakan bahwa *Trafficking* yang bisa diartikan perpindahan seseorang secara rahasia dan terlarang dengan melintasi suatu perbatasan wilayah berujung memaksa seseorang (perempuan) untuk masuk dalam suatu situasi seksual, ekonomi atau fisik dengan cara menekan dan eksploitatif, serta memberi keuntungan bagi para pelaku yang merekrut, mentransfer atau terkait dengan sindikat kejahatan.

Siti Homzah juga mengungkapkan hasil penelitian *trafficking* di Kab. Bandung, Indramayu, dan Karawang. Menurutny, aktivitas *trafficking* di tiga daerah tersebut merupakan jaringan terstruktur secara sistematis. Di sana melibatkan *traffickers* (unsur aktor), mulai calo dengan berbagai tingkatan, geromo/mami, manajer pengelola, pemilik modal/bos, hingga konsumen atau pemakai. Pada alur proses itu terjadi berbagai tindakan kekerasan, sejak dari pemindahan, penampungan, hingga penempatan. Sedangkan jika terjadi sekaligus kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, sosial, dan seks, maka

⁹ Program dan agenda tersebut ditandangani di Jakarta, 31 Agustus 2006.

implikasinya pun cukup berat. Korban mengalami depresi, gangguan kejiwaan, percobaan bunuh diri, dan menderita sakit berkepanjangan.

Sementara itu Djaenudin Harun dan Komala Nurmalia yang ikut dalam seminar tersebut, sempat mengatakan bahwa anak-anak (perempuan) yang dijadikan pelacur di Indonesia pun terus merebak. Di Indonesia jumlahnya diperkirakan mencapai 22.197 orang. Sayang dari 25 buah undang-undang, 5 peraturan pemerintah, 8 keputusan presiden, 4 instruksi presiden, 13 keputusan menteri, dan 4 surat edaran, yang semuanya menyangkut kesejahteraan dan perlindungan anak, belum 100% mengacu pada kriteria, efektivitas, dan tujuan hukum. Hal itu sangat ironis, ketika ternyata perangkat hukum yang ada-pun belum cukup melindungi perempuan dari tindakan kekerasan. Lagi-lagi teknologi di situ cukup bermain cantik baik posisinya sebagai sebuah alat komunikasi, alat transfer atau apapun yang bisa dihubungkan dengan teknologi. Jelas bahwa teknologi cukup ikut andil besar dalam mensupport budaya-budaya kekerasan terhadap perempuan.

Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan bukan fenomena baru. Berbagai komentar atau tanggapan tentang latar belakang terjadinya aksi kekerasan, masih menjadi perdebatan yang belum usai. Daftar keprihatinan pun bisa dibuat teramat panjang. Apalagi bila mau merunutnya dari sudut sejarah. Zaman Jahiliyah sebelum Islam di Zajirah Arab merupakan catatan kelam bagi tiap ibu yang melahirkan anak perempuan. Sebab si jabang bayi sesuai tradisi yang berlaku, pasti akan di kubur hidup-hidup. Atau tatkala pelayan wanita Firaun, Masitah, dibakar hidup-hidup karena menolak mengakui dirinya sebagai tuhan. Di Eropa, peristiwa yang terkenal dalam sejarah adalah kekerasan yang dilakukan terhadap pahlawan wanita Perancis Jean d'Arc, karena dituduh melakukan praktek sihir.¹⁰

Di Indonesia sendiri, nasib perempuan sampai saat ini pun belum mencapai banyak kemajuan. Lebih seabad sudah Kartini telah tiada, namun kekerasan yang secara diametral bertentangan dengan cita-cita Kartini masih berlanjut. Kekerasan dengan bermacam polah dan tingkahnya, tetap

¹⁰ RE Nadalsyah, "Perempuan Dan Kekerasan" dalam *Banjermasin Post* 24/11/2002.

mengusik dan mewarnai kehidupan masyarakat. Palestina yang masih terus berdarah, dan tragedi Legian Bali yang mencoreng citra bangsa itu. Bukan hanya pembicaraan seputar jender yang belum usai, tapi juga kekerasan yang dialami PRT (Pembantu Rumah Tangga), perempuan muda yang diselundupkan untuk dijadikan pekerja seks, prostitusi dan pekerja anak, atau kekerasan suami terhadap isteri dan anak dalam rumah tangga, yang selalu menempatkan isteri dan anak dalam posisi tidak berdaya.¹¹

Kasus perkosaan sejumlah wanita saat kerusuhan massal di ibukota, adalah fakta paling gamblang yang mengungkap praktek kekerasan terhadap perempuan. Dalam kasus yang lebih menyentuh peristiwa yang dialami pahlawan buruh Marsinah yang terbunuh saat memperjuangkan perbaikan nasib rekan-rekannya, adalah bukti autentik tentang kekerasan terhadap perempuan. Padahal banyak lagi peristiwa yang luput dari pen-ciuman pers atau sengaja disembunyikan dari liputan pers.¹² Di sini secara umum terjadinya kekerasan bisa ditafsirkan sebagai refleksi ketidakpuasan terhadap berbagai fenomena kehidupan dengan latar belakangnya seperti ketidakadilan dalam penerapan hukum, praktek KKN, perlakuan tidak simpatik aparat dan sebagainya. Ketidakpuasan yang lama terpendam cenderung membuat masyarakat emosional dan memunculkan chaos, kerusuhan atau kekerasan.

Namun kekerasan terhadap perempuan seyogianya harus dilihat dari perspektif sosial budaya yang telah diakui secara turun temurun dalam suatu komunitas atau lingkungan tertentu masyarakat. Karena itu masalah jender sebagai kodrat yang membedakan pria-wanita, memang tidak lepas dari persoalan feodalisme dan tradisionalisme dari suatu masyarakat agraris yang ingin menjadi bagian masyarakat modern. Keberadaan diri sebagai kodrat wanita oleh wanita sendiri telah memposisikannya untuk menerima nasib yang telah tersurat untuk disubordinasikan pada wanita miskin tampak betapa mereka tidak memiliki kekuatan tawar menawar (*bargaining power*) sama sekali, dan harus menerima nasibnya dengan pasrah.

¹¹ RE Nadalsyah, "Perempuan Dan Kekerasan" dalam *Banjermasin Post* 24/11/2002.

¹² *Ibid.*

Dengan masuknya teknologi pertanian, sumber ekonomi mereka pun tergeser, sebab buruh laki-lakilah yang diutamakan. Sedang kemiskinan itu sendiri merupakan lingkaran setan, dan bagi wanita merupakan derita hidup yang berkepanjangan. Kekerasan memang tidak begitu saja muncul tapi lewat suatu proses. Secara fisik dan psikis kekerasan sangat beragam. Secara umum dapat dikategorikan berupa pelecehan, penganiayaan, dan ancaman atau intimidasi sampai kepada isolasi. Seharusnya di masa kini, kekerasan dapat diminimalisasi. Semakin meningkat taraf pendidikan wanita, semakin membuka peluang untuk mengurangi kekerasan dan perbedaan. Jelas lelaki dan wanita berbeda dan bisa menjadi dasar dari stereotip yang berlaku dalam masyarakat. Namun perbedaan gender itu tidak harus menafikan peran perempuan untuk mengekspresikan diri secara manusiawi, dalam menghadapi tantangan zaman seperti laki-laki.¹³

Di zaman kini, konsep ketimuran yang menjadi kebanggaan itu, juga selain ditentukan oleh tradisi, adat, kebudayaan, bahkan juga ideologi dan gaya hidup, hanyalah bagian dari keseluruhan norma dan nilai dalam masyarakat. Dengan demikian kekerasan terhadap perempuan sama sekali tidak beralasan. Sebab hubungan antara wanita dan pria adalah salah satu hubungan yang paling wajar, paling alami. Namun akibat konstruksi sosialnya yang menghasilkan stereotip dan hirarki, jarang orang mau mengakuinya dengan jujur. Orang terperangkap oleh kemunafikan yang menghambat kedewasaan diri, kematangan dan keterbukaan. Karena itu pengembangan konsep, peran dan status wanita, seharusnya lebih diberdayakan oleh wanita itu sendiri.

Melihat hal itu, tentu penting sekali untuk merenungi ulang rencana komitmen dari Temu Nasional Aktivis Perempuan Indonesia, sebagaimana dilansir *rumahkiri.net* yang telah menghasilkan 12 agenda khusus gerakan perempuan untuk tahun 2006-2011.¹⁴ Yaitu seperti bagaimana meningkatkan kapasitas perempuan dalam pemanfaatan berbagai teknologi, menggunakan teknologi untuk membangun simpul informasi dan komunikasi,

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Sumber diambil dari *Rumahkiri.net*.

memperkuat akses perempuan terhadap teknologi dan melakukan kampanye teknologi yang ramah perempuan. Statemen terakhir ini penting untuk direnungkan, yaitu; “mengkampanyekan teknologi yang ramah perempuan”.

V. Kesimpulan

Sekian pembacaan yang ada dari berbagai persoalan yang menimpa kaum perempuan, ternyata sosialisasi teknologi menjadi sangat penting. Adapun kesimpulan sementara dari pembacaan terkait mengenai “pengandaian untuk dibuatkannya teknologi yang ramah perempuan”, disimpulkan:

Pertama, agar kiranya pada ahli dan pakar IT untuk segera berbenah diri membantu bangsa menyelesaikan persoalan umat yang kian ruwet. Apa gunanya banyak teknologi jika pada akhirnya membuat bangsa dan negara menjadi susah, tentu pakar dan para ahli IT paham akan hal itu untuk selanjutnya membuat beberapa tindakan untuk menciptakan pengembangan teknologi yang ramah pada perempuan. Hal itu disebabkan karena selama ini 80% dari peran teknologi yang ada cenderung mensubordinat wanita bahkan merugikan kaum hawa tersebut.

Kedua, pengandaian teknologi ramah perempuan saat ini sudah seharusnya tidak menjadi pengandaian-pengandaian semata, akan tetapi sudah selayaknya untuk dipertimbangkan semua elemen masyarakat dan negara sebagai agenda bersama guna menciptakan suasana harmonis membangun kualitas sumberdaya manusia seutuhnya dan menuju Indonesia yang berbudaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairil. *Islam dan Tantangan Kemanusiaan Abad XXI*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Katjasungkana, Nussyahbani (dkk). *Potret Perempuan; Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru*. Yogyakarta: PSW UMY dan Pustaka Pelajar, 2001.
- Kennedy, P. *Preparing for the Twenty First Century*. Random House, New York, 1993.
- Mosse, Julia Cleves. *Half the World, Half a Chance; An Introduction to Gender and Development*, terj. Hartian Silawati ; *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Rifka Anisa' dan Pustaka Pelajar, 2007.
- RE Nadalsyah. "Perempuan Dan Kekerasan" dalam *Banjermasin Post* 24/11/2002.
- Sardar, Z. *The Future of Muslim Civilization*, Mansell Publishing. London, 1987.
- www.rumahkiri.net.
- Yulia, Arvita. "Kekerasan terhadap Wanita Kian Mencemaskan", dalam *Suara Pembaruan Daily*. Selasa/10 Juli 2007.